

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transmigrasi penduduk sudah dikenal sejak tahun 1905, yaitu pada masa pendudukan Belanda. Desa Gedong Tataan di Provinsi Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa. Menurut Sayogyo dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun (1985: 32 & 79), bahwa ide yang melatarbelakangi pelaksanaan transmigrasi pada masa kolonisasi adalah untuk mengurangi kelebihan penduduk agar dapat mengatasi penurunan kemakmuran di pulau Jawa serta mempersiapkan penyediaan buruh murah pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri kapitalis yang akan dibangun di luar Pulau Jawa melalui pengerahan tenaga kerja secara kasar.

Transmigrasi umum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada zaman Orde Baru (Orba) dimulai pada Pelita I (Pembangunan Lima Tahun tahap I) dan diteruskan secara besar-besaran pada Pelita II, III dan IV (H.J Schophuys dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun, 1985: 55). Menurut Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun, (1985: 76) bahwa Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) pada masa Orde Baru dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang ke-I cukup berhati-hati dan tidak menetapkan target jumlah transmigran. Pada tahap ini transmigran yang berhasil

dipindahkan hanya 127.689 jiwa. Pada Repelita II menyatakan bahwa yang menjadi sasaran kebijakan transmigrasi adalah meningkatkan jumlah transmigran sebesar mungkin. Jumlah transmigran yang ditargetkan adalah 1,25 juta jiwa akan tetapi pada kenyataannya hanya 204.250 jiwa transmigran yang dapat dipindahkan.

Pada Repelita III diperoleh hasil bahwa transmigrasi tidak hanya mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu, akan tetapi dapat memperluas landasan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya baik pada sektor pertanian, sektor pembangunan daerah maupun sektor transmigrasi itu sendiri. Sementara pada Repelita IV, transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru terutama daerah pertanian dalam rangka pembangunan daerah. Pelaksanaan transmigrasi merupakan salah satu kegiatan untuk menata kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah baik di daerah asal maupun daerah tujuan.

Secara resmi transmigrasi penduduk ke Provinsi Lampung berawal dengan menempatkan 155 kepala keluarga (KK) asal Pulau Jawa di desa pertama yaitu Desa Gedong Tataan di Kabupaten Lampung Selatan pada bulan November 1905, kemudian pada 02 November tahun 2007 daerah ini memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan menjadi Kabupaten Pesawaran. Keberangkatan 155 KK sebagai kolonis pertama dalam pembangunannya dipimpin oleh asisten residen Pemerintahan Hindia Belanda yang bernama H.G. Heyting. Setelah kolonisasi Gedong Tataan diikuti oleh pemukiman Wonosobo tahun 1921 dan Sukadana tahun 1932 (Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun, 1985: 70).

Sesuai dengan SK Gubernur No.074/DPD/HK/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 1980 bahwa Provinsi Lampung sudah tertutup untuk transmigrasi umum artinya Provinsi Lampung bukan sebagai daerah penerima transmigrasi umum lagi, akan tetapi arus transmigrasi spontan terus menerus terjadi dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung. Kondisi tersebut bertambah parah dengan dibukanya pelabuhan penyebrangan Merak – Bakauheni pada tahun 1979 sehingga masyarakat Jawa dengan mudah pindah ke Sumatera khususnya Provinsi Lampung. Akibat dari arus transmigrasi yang tinggi ke Lampung jumlah penduduk di daerah Lampung semakin bertambah dari 718.000 jiwa pada tahun 1950 menjadi lebih dari 5 juta jiwa pada tahun 1985. Arus transmigrasi spontan itu jauh lebih besar daripada arus transmigrasi yang disalurkan pemerintah (Purboadiwidjojo dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun, 1985: 20).

Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 1990 yaitu sebesar 6.015.803 jiwa dengan luas 35.376,5 km<sup>2</sup>. Sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 6.730.000 jiwa dan sebanyak 7.843.000 jiwa pada sensus penduduk tahun 2010. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung salah satunya yaitu Kabupaten Lampung Selatan. Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luas daratan kurang lebih sekitar 2.007,01 km<sup>2</sup>. Kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 kecamatan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan adalah 932.555 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar yaitu 176.370 jiwa dan yang terkecil di Kecamatan Way Panji

yaitu 16.495 jiwa, dengan demikian konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Natar	90.311	86.059	176.370
2	Jati Agung	54.953	50.954	105.907
3	Kalianda	43.483	39.555	83.038
4	Tanjung Bintang	36.010	34.414	70.424
5	Katibung	32.556	30.473	63.030
6	Sidomulyo	29.428	27.743	57.171
7	Palas	27.728	26.623	54.351
8	Candipuro	26.399	25.059	51.458
9	Merbau Mataram	24.328	22.833	47.161
10	Ketapang	24.283	22.798	47.081
11	Penengahan	18.706	17.339	36.045
12	Sragi	16.433	15.624	32.057
13	Tanjung Sari	14.179	13.443	27.622
14	Way Sulan	11.153	10.459	21.612
15	Bakauheni	11.179	10.389	21.568
16	Rajabasa	11.187	9.978	21.165
17	Way Panji	8.328	8.167	16.495
	Total	480.643	451.909	932.555

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ansor sebagai kasi penempatan dan pemindahan yang merupakan salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) bahwa calon transmigran yang mengikuti pelaksanaan program transmigrasi sebagian besar bekerja sebagai buruh tani atau biasa disebut petani penggarap. Mereka mengolah lahan milik petani lain atau biasa disebut petani pemilik dengan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut yang menyebabkan pemerintah melakukan program transmigrasi penduduk dengan daerah tujuan transmigrasi ke pulau Kalimantan. Pada dasarnya pelaksanaan

transmigrasi ke Pulau Kalimantan sudah dilakukan sejak tahun 1936, pada masa pendudukan Hindia Belanda dengan memukimkan penduduk dari Pulau Jawa ke daerah rawa di sebelah hilir Banjarmasin (H.J Schophuys dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun, 1985: 55). Dari dahulu sampai sekarang Pulau Kalimantan merupakan pulau yang menjadi tujuan utama pelaksanaan transmigrasi. Hal ini disebabkan karena Pulau Kalimantan kaya akan sumber daya alam baik dari pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan maupun hasil hutannya (H.J Schophuys dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun, 1985: 53). Selain itu, di Kalimantan telah terdapat perusahaan-perusahaan sawit yang cukup luas dan tentunya hal itu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Program transmigrasi ke luar Provinsi Lampung menjadi salah satu alternatif Pemerintah Provinsi Lampung dalam memfasilitasi keinginan masyarakat Lampung yang cukup tinggi untuk mengikuti program transmigrasi ke daerah lain. Oleh karena itu sejak tahun 2006 Pemerintah Provinsi Lampung (Daerah Asal Transmigrasi) melaksanakan kerja sama bidang ketransmigrasian dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi (Daerah Tujuan Transmigrasi), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kerja sama antar daerah (KSAD) antara pemerintah kabupaten daerah asal transmigrasi dengan pemerintah kabupaten daerah tujuan transmigrasi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2012).

Transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan transmigrasi umum yang dibiayai dan diawasi oleh pemerintah. Peserta transmigrasi yang akan diberangkatkan telah mendapat anggaran bantuan uang saku dari Pemerintah Provinsi Lampung dengan menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 1.000.000,-/KK (Kepala Keluarga) untuk setiap pemberangkatan. Uang saku hanya diberikan ketika para transmigran akan berangkat transmigrasi. Selain itu mereka juga mendapatkan bantuan perbekalan berupa sandang, alat dapur, alat tidur, dan alat penerangan.

Bapak Ansurudin (kasi penempatan dan pemindahan di Disnakertrans Lampung Selatan), menyebutkan bahwa setelah sampai di daerah tujuan peserta transmigrasi mendapatkan pembinaan selama 5 tahun di daerah penempatan. Mereka juga mendapatkan jaminan hidup selama 1 tahun. Jaminan itu diberikan oleh pemerintah pusat yang kemudian disalurkan melalui pemerintah daerah setempat. Transmigran yang tinggal di daerah lahan kering dan jaminan hidup selama 1 tahun 6 bulan bagi transmigran yang tinggal di daerah lahan basah. Lahan basah yang ada di daerah tujuan transmigrasi berupa lahan gambut. Lahan seperti ini memerlukan waktu lebih lama dalam pengolahannya dibandingkan dengan lahan kering. Lahan kering tidak memerlukan waktu yang intensif untuk bisa ditanami. Maka dari itu pemerintah memberikan perbedaan waktu bagi mereka yang mendapatkan daerah lahan basah.

Bapak Ansor menambahkan bahwa calon transmigran yang diberangkatkan adalah calon transmigran yang telah lolos tes seleksi peserta transmigrasi. Tes tersebut berupa tes wawancara yang dibedakan menjadi dua tahap yakni

wawancara mengenai kondisi tempat tinggal dan tes kejiwaan. Tes kejiwaan dilakukan oleh psikolog yang ikut dilibatkan dalam penyeleksian calon transmigran. Mengenai kondisi tempat tinggal calon transmigran diperoleh informasi melalui perangkat desa di daerah tempat tinggal mereka. Berdasarkan data yang ada, hampir seluruh transmigran yang diberangkatkan memiliki pekerjaan sebagai petani dengan kondisi ekonomi yang lemah serta tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat yang bertransmigrasi sebagian besar tidak memiliki lahan pertanian di daerah asalnya sehingga sulit bagi mereka mendapatkan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya keinginan mengubah nasib membuat transmigran mengikuti program transmigrasi.

Selain itu mereka yang melakukan transmigrasi harus memiliki usia yang ideal sesuai dengan syarat transmigrasi yakni usia antara 18 – 45 tahun. Usia ideal ini sangat dibutuhkan di daerah tujuan transmigrasi karena sebagai transmigran mereka mempunyai tugas berat sebagai pembuka hutan atau lahan. Pekerjaan ini membutuhkan tenaga ekstra, oleh karena itu para transmigran seharusnya didominasi oleh mereka yang berusia produktif.

Para transmigran berasal dari beberapa kecamatan di Lampung Selatan. Salah satunya yaitu Kecamatan Ketapang. Untuk lebih jelasnya sebaran jumlah kepala keluarga transmigran dari Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga Transmigran dari Kabupaten Lampung Selatan ke Kalimantan Menurut Kecamatan Tahun 2011 - 2012

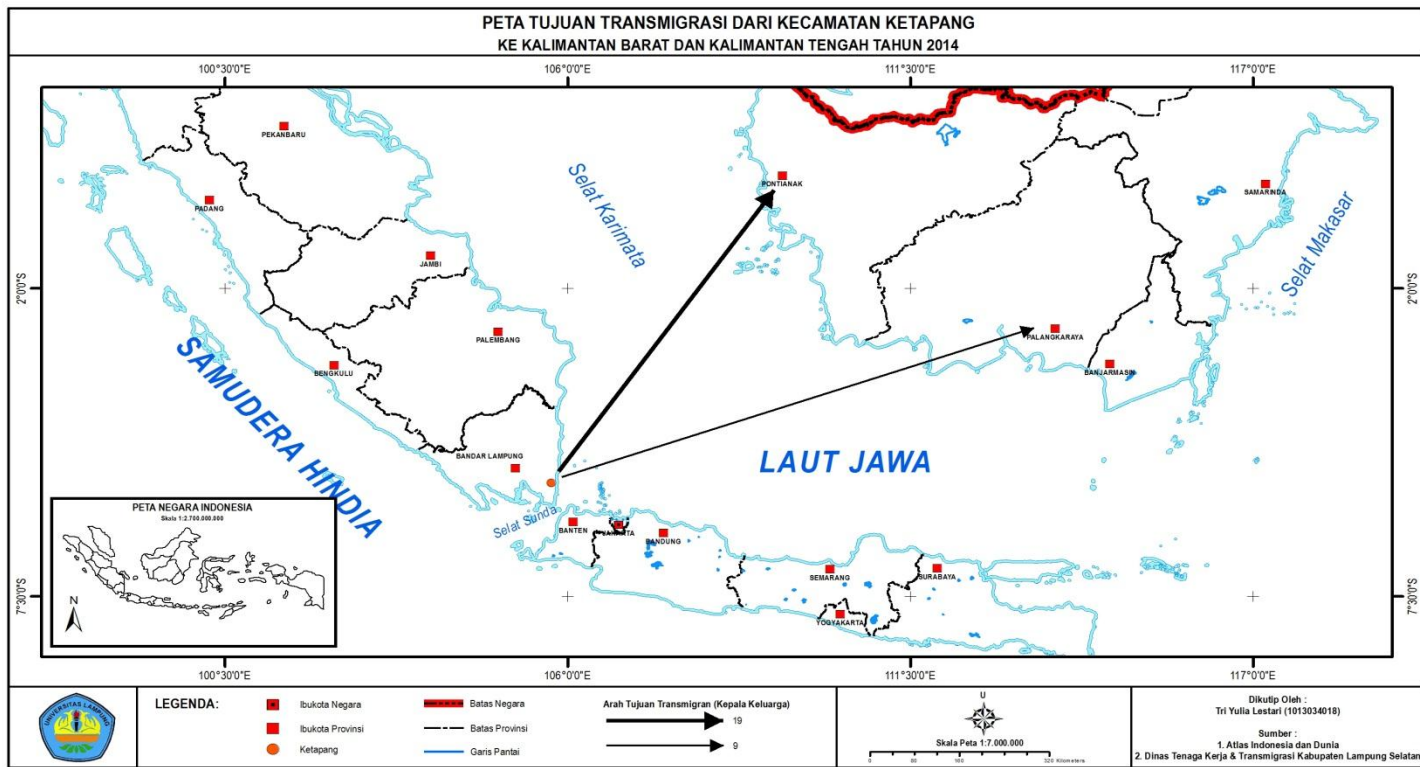
Kecamatan	Jumlah KK Transmigran		Total Per Kecamatan
	Tahun 2011	Tahun 2012	
Natar	4	1	5
Jati Agung	2	0	2
Tanjung Bintang	0	0	0
Tanjung Sari	0	0	0
Katibung	1	3	4
Merbau Mataram	0	0	0
Way Sulan	11	3	14
Sidomulyo	4	1	5
Candipuro	2	1	3
Way Panji	0	1	1
Kalianda	0	1	1
Rajabasa	0	0	0
Palas	2	0	2
Sragi	3	0	3
Penengahan	2	0	2
Ketapang	19	9	28
Bakauheni	0	0	0
Total	50	20	70

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2012

Kecamatan ketapang memiliki luas daratan sekitar 108.60 km<sup>2</sup> atau 5,41% dari luas Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 47.081 jiwa atau 5,05% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2011 - 2012 transmigran yang berasal dari Kecamatan Ketapang berjumlah 28 kepala keluarga. Terdiri dari 19 kepala keluarga pada tahun 2011 dan 9 kepala keluarga pada tahun 2012. Peserta transmigrasi pada tahun 2011 diberangkatkan ke UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Sabung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sedangkan pada tahun 2012 peserta transmigrasi diberangkatkan ke UPT Tumbang Jatuh, Kabupaten



Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta tujuan transmigrasi dari Kecamatan Ketapang ke Pulau Kalimantan.



Gambar 1: Peta Tujuan Transmigrasi dari Kecamatan Ketapang ke Pulau Kalimantan Tahun 2014

Para transmigran yang berasal dari Kecamatan Ketapang terdiri dari beberapa suku dan agama yang tersebar diberbagai desa. Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Ketapang secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Mayoritas penduduk di Kecamatan Ketapang adalah penduduk pendatang. Sebagian kecil penduduk asli Lampung menyebar dihampir semua desa, akan tetapi dalam jumlah yang relatif kecil. Penduduk pendatang sebagai mayoritas, sebagian berasal dari Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta). Selain itu ada juga penduduk yang berasal dari Bali, Sulawesi (Bugis), dan juga dari Propinsi lain di Pulau Sumatera seperti Sumatera Barat (Minang), Sumatera Utara (Batak), Sumatera Selatan (Semendo), dan lain-lain.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu diketahui bagaimana Karakteristik Sosial Ekonomi Pelaku Transmigrasi Dari Kabupaten Lampung Selatan Ke Pulau Kalimantan Tahun 2011 – 2012 (Kasus di Kecamatan Ketapang).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah karakteristik sosial ekonomi kepala keluarga transmigran yang berasal dari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 – 2012.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka didapat rumusan masalah berupa:

1. Berapakah umur kepala keluarga transmigran?
2. Bagaimanakah tingkat pendidikan kepala keluarga transmigran?
3. Bagaimanakah pekerjaan kepala keluarga transmigran?
4. Berapakah jumlah anak yang dimiliki kepala keluarga transmigran?
5. Berapakah rata-rata luas lahan sawah yang dimiliki kepala keluarga transmigran?
6. Berapakah rata-rata pendapatan kepala keluarga transmigran?

### **D. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka setiap penelitian harus memiliki tujuan yang merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi tentang umur kepala keluarga transmigran.
2. Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat pendidikan kepala keluarga transmigran.
3. Untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan kepala keluarga transmigran.
4. Untuk mendapatkan informasi tentang jumlah anak yang dimiliki kepala keluarga transmigran.

5. Untuk mengetahui berapakah rata-rata luas lahan sawah yang dimiliki kepala keluarga transmigran.
6. Untuk mengetahui berapakah rata-rata pendapatan kepala keluarga transmigran.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah mengenai tindakan yang harus dilakukan sebelum melakukan program transmigrasi.
2. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang transmigrasi bagi masyarakat luas.
3. Sebagai suplemen materi pada mata kuliah Geografi Transmigrasi dan Pemukiman.
4. Sebagai suplemen bahan ajar Geografi SMA Kelas XI Semester 1 pada Kompetensi Dasar Kependudukan.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah kepala keluarga transmigran Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2012.

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah karakteristik sosial ekonomi kepala keluarga transmigran Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2012.
3. Ruang lingkup tempat penelitian Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2014.
5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Geografi. Sub Ilmu Geografi Transmigrasi dan Pemukiman.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian bahwa pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.